

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agoes, ETTY. R, 1991, *Konvensi Hukum Laut 1982 dan Pengantar Hak Lintas Kapal Asing*, Abardin, Bandung
- Amiroedin Sjarif, 1997, *Perundang-undangan : Dasar, Jenis, dan teknik Membuatnya*, Rinerka Cipta, Jakarta
- Boer Mauna, 2008, *Hukum Internasional*, Alumni, Bandung
- INCAFO, 2013, *Sewindu Memerahputihkan Birunya Lautan Indonesia*, ILUNI FTUI, Jakarta
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1986, *Hukum Laut Internasional*, Binacipta, Bandung
- Malayu S.P Hasibuan, 2006, *Manajemen : Dasar, Pengetian dan Masalah*, Bumi Aksara, Jakarta
- Martono, H.K, Eka Budi Tjahjono, 2011, *Transportasi Di Perairan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta
- Mohamad Sodik, Dikdik, 2011, *Hukum Laut Internasional*, Refika Aditama, Bandung
- Mirza Satria Buana, *Hukum Internasional, Teori dan Praktek*, Nusa Media Bandung.
- Nwezee, Augustine, 2006, *The Impact of Cabotage Act on Entrepreneurial Opportunities and Nigeria's Economic Growth*, ST.Clements University
- Soedjono, Wiwoho, 1983, *Pengangkutan Laut Dalam Hubungannya Dengan Wawasan Nusantara*, Bina Aksara, Jakarta
- Soegeng, Wartini, 1988, *Pendaftaran Kapal Indonesia*, PT Eresco, Bandung
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian hukum*, UI-Press, Jakarta
- Sudjatmiko, F.D.C, 1979, *Pokok-Pokok Pelayaran Niaga*, Bhratara Karya Aksara, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan ke 5, Kencana, Jakarta

Umar, M. Husein, 2001, *Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indonesia*, Buku 2, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Internasional:

Republik Indonesia. Undang – Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849

_____. Undang – Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea elayaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3319

_____. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26

_____. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 262

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 79

_____.Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 47

_____. Peraturan Menteri Perhubungan No. 71 Tahun 2005 Tentang Penganku Cara Dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan an Barang/Muatan Antar Pelabuhan Laut Di Dalam Negeri

_____.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2011 tentang Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing

Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang Dan/Atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri

_____. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2014 tentang Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang Dan/Atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri

_____. Peraturan Menteri Perhubungan No. 200 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga PM 10 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang Dan/Atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri

_____. Peraturan Menteri Perhubungan No. 100 Tahun 2016 Tentang Cara Dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang Dan/Atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri

_____. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/ PMK.011 / 2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor

Instrumen Hukum Asing

United Nations Convention on Law of the Sea (1982)

Jurnal dan Artikel :

Cf. Black's Law Dictionary 6th Edition page 202, ter kutip dalam Mike Igboke, *Advocacy Paper For The Promulgation of a Nigerian Maritime Cabotage Law*, diakses dari <http://www.mikeigbokwe.com> pada 11 Oktober 2016

Daniel Essiet, 2010, *Why Cabotage has not worked?*, <http://thenationonlineng.net>, diakses pada 25 September 2016.

Direktorat Transportasi, *Laporan Implementasi Konsep Tol Laut*, 2015, Kementerian PPN Bappenas

Ditjen Hubla, Direktorat Pengembangan Usaha Angkutan Laut, 2016, *Laporan Akhir tahun 2016*, Kementerian Perhubungan, Jakarta

Etty R. Agoes “Praktik Negara-Negara Atas Konsepsi Negara Kepulauan”, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol.1, No. 3, Mei 2004.

Febri Putra Trivitas, 2011, *Mengupas Konsep Azas Cabotage Sebagai Analisis Kebijakan Publik*, Program Studi Transportasi Laut, Institut Teknologi

Sepuluh November, Surabaya, hlm.4, diakses dari <http://www.scribd.com> pada 12 Oktober 2016

F.D.C.Sudjatmiko, 2011, *Sejarah Maritim Indonesia*, artikel 19 Agustus 2011, diakses dari <http://konsultanmaritim.blogspot.com> pada 18 Desember 2016.

Hasibuan, Rosmi, 2002, *Penegakan Hukum Di Bidang Pelayaran Bagi Kapal Asing Di Perairan Indonesia (Suatu Studi Melalui Perairan Belawan LANTAMAL-I Sumatera Utara)*, Fakultas Hukum Jurusan Hukum Internasional, Universitas Sumatera Utara

INCAFO, 2016, "Laporan Implementasi Tol Laut PT. Pelni ,dalam Transformasi Tol Laut" Makalah, ILUNI FTUI, Jakarta

Mochtar Kusumaatmadja dalam makalah "Pembinaan Pelayaran Nasional dalam Rangka Penegakan Wawasan Nusantara", disampaikan pada Seminar tentang Pelayaran Nasional, tanggal 19-20 Oktober 1994 di Kanindo Plaza, Jakarta

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, 2011, *Kajian Pemahaman Azas Cabotage dan Penerapannya di Berbagai Negara*, Kementerian Perhubungan, Jakarta

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, 2015, *Studi pengembangan Short sea shipping dalam Meningkatkan Kelancaran Arus barang*, Kementerian Perhubungan, Jakarta

Putri, Febriza, 2013, *Penerapan Cabotage Dalam PP Nomor 22 Tahun 2011 Tentang perubahan atas PP Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan Terhadap Kapal Penujang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi*, Skripsi, FHUI, Jakarta